

ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun lintas batas negara, Indonesia adalah salah satu negara yang mana kasus perdagangan orang masih sering terjadi di dalamnya, salah satunya di daerah Kabupaten Sumenep, perdagangan orang yang umum terjadi menggunakan modus adopsi ilegal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adopsi ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal di Kabupaten Sumenep.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis sosiologis untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang karena adanya pengadaaan uang sebagai imbalan yang diberikan kepada orang tua kandung oleh orang tua angkat dalam proses adopsi tersebut serta adanya tujuan eksploitasi yaitu sebagai pekerja dengan upah yang minim. Adapun perlindungan bagi anak dari perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal di Kabupaten Sumenep yaitu terdapat 2 macam, perlindungan hukum preventif yaitu dengan adanya sosialisasi-sosialisasi ke desa-desa pelosok yang berkaitan dengan anak untuk mengurangi adanya anak yang terlantar yang kemudian diadopsikan kepada orang lain. Perlindungan hukum represif yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kata Kunci : Adopsi Ilegal, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Trafficking in persons (human trafficking) is a transnational crime that can occur within or across national borders, Indonesia is one of the countries where cases of trafficking in persons still often occur in it, one of which is in the Sumenep District area, trafficking in persons commonly occurs using the mode of illegal adoption. This study was conducted to determine illegal adoption that can be qualified as a criminal offence of trafficking in persons and the protection of children from criminal offences of trafficking in persons with the mode of illegal adoption in Sumenep District.

This research method is empirical legal research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research uses a conceptual approach and a sociological juridical approach to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object.

The results of this study indicate that illegal adoption can be qualified as a criminal act of trafficking in persons because of the procurement of money in return given to biological parents by adoptive parents in the adoption process and the purpose of exploitation, namely as workers with minimal wages. As for the protection for children from trafficking in persons with illegal adoption mode in Sumenep District, there are 2 kinds, preventive legal protection is with the socialisation to remote villages related to children to reduce the existence of neglected children who are then adopted to others. Repressive legal protection is the existence of the Sumenep District Regulation Number 7 of 2011 concerning the Implementation of Protection of Women and Children Victims of Violence.

Keywords: Illegal Adoption, Human Trafficking, Child Protection